

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2011-2014

THE EFFECT OF FUND CONSIDERATIONS AND THE FINANCIAL REGION OF THE FINANCE OF COMMUNITY WELFARE IN DISTRICT AND CITY IN WEST JAVA YEAR 2011-2014

Nugraha dan Tia Amelia¹

Universitas Pendidikan Indonesia
Gedung Garnadi Lt-3 Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung – 40154 Jawa Barat
Telp. (022) 2001619, Fax. (022) 2001621

(diterima 17 Maret 2017; revisi 7 Juni 2017)

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of intergovernmental transfers fund and the region's autonomy in financing public welfare at local government (municipal and districts) in West Java. This research employs survey with verification approach, and documentation as data collection techniques. Financial data is taken from the report of the budget realization published by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The the data of public welfare is taken from the report of human development index (HDI) published by the central agency statistics (BPS) in 2011-2014. The results show that increasing the amount of intergovernmental transfers fund and the level of the region's autonomy in finance have impacts in improving the HDI as a measurement of public welfare.

Keywords: *intergovernmental transfers fund, the region's autonomy in finance, public welfare, local government*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana alokasi dari pemerintah pusat dan kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah survei dengan pendekatan verifikatif, dan menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Data keuangan diambil dari laporan realisasi anggaran, sementara itu, data kesejahteraan masyarakat menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dana alokasi dari pemerintah pusat dan tingkat kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan IPM sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Kata Kunci: dana alokasi, kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota

¹ Email: nugraha@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional. Pada saat berbicara kesejahteraan pada tingkat daerah, maka seharusnya otonomi daerah juga diarahkan pada hal yang sama pada level daerah. Ada banyak ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat ini salah satunya adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam konteks Jawa Barat, sesuai dengan data BPS, pada tahun 2014, IPM Jawa Barat mencapai angka 68,80 dan angka tersebut berada pada peringkat ke-12 dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Bahkan selama dalam periode tahun 2011-2014 pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat, walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya namun selalu berada di bawah rata-rata IPM Nasional. Tahun 2011 selisih capaian IPM dengan nasional tersebut sebesar -0,42; tahun 2012 dengan selisih -0,38; tahun 2013 dengan selisih -0,06; dan tahun 2014 dengan selisih -0,1. Bahkan dengan kondisi tersebut, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang belum dapat mencapai target IPM yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN), yang menargetkan IPM nasional tahun 2014 adalah sebesar 72,7. Bagi Jawa Barat sebagai yang paling dekat dengan ibu kota dan daerah perlintasan utama ke ibu kota, kondisi ini cukup disayangkan. Yang seharusnya dengan kondisi yang ada justru menjadi peluang bagi percepatan ketercapaian IPM tersebut, melalui pertumbuhan industri, perdagangan, serta keterserapan tenaga kerja yang besar.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018, tahun 2014 telah ditetapkan target IPM sebesar 74,25. Dengan demikian capaian di angka 68,80 bukan saja tidak dapat mencapai target IPM Nasional, namun juga belum mencapai target IPM yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut.

Sebagai daerah provinsi, tentu ketercapaian IPM tidak lepas dari kontribusi kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Data dari BPS menunjukkan bahwa capaian IPM di kabupaten dan kota di Jawa Barat masih berkisar antara 62,1 sampai 72,6. Hal ini dapat dikatakan kabupaten dan kota belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 IPM Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2011 - 2014

No	Prov/Kab/Kota	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
	Jawa Barat	66.67	67.32	68.25	68.80
1	Kab.Bogor	64.78	65.66	66.74	67.36
2	Kab.Sukabumi	61.14	62.27	63.63	64.07
3	Kab.Cianjur	59.38	60.28	61.68	62.08
4	Kab.Bandung	67.78	68.13	68.58	69.06
5	Kab.Garut	60.55	61.04	61.67	62.23
6	Kab.Tasikmalaya	61.05	61.69	62.40	62.79
7	Kab.Ciamis	65.48	66.29	67.20	67.64
8	Kab.Kuningan	65.04	65.60	66.16	66.63
9	Kab.Cirebon	64.17	64.48	65.06	65.53
10	Kab.Majalengka	62.67	63.13	63.71	64.07
11	Kab.Sumedang	66.16	67.36	68.47	68.76
12	Kab.Indramayu	61.47	62.09	62.98	63.55
13	Kab.Subang	64.21	64.86	65.48	65.80
14	Kab.Purwakarta	65.51	66.30	67.09	67.32
15	Kab.Karawang	65.21	65.97	66.61	67.08
16	Kab.Bekasi	68.66	69.38	70.09	70.51
17	Kab.Bandung Barat	62.36	63.17	63.93	64.27

No	Prov/Kab/Kota	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
18	Kab.Pangandaran	-	-	64.73	65.29
19	Kota Bogor	71.72	72.25	72.86	73.10
20	Kota Sukabumi	68.67	69.74	70.81	71.19
21	Kota Bandung	78.13	78.30	78.55	78.98
22	Kota Cirebon	71.49	71.97	72.27	72.93
23	Kota Bekasi	77.48	77.71	78.63	78.84
24	Kota Depok	76.96	77.28	78.27	78.58
25	Kota Cimahi	74.41	74.99	75.85	76.06
26	Kota Tasikmalaya	67.18	67.84	68.63	69.04
27	Kota Banjar	67.15	67.53	68.01	68.34

Sumber: jabar.bps.go.id (data diolah)

Sejalan dengan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini IPM, akan merujuk pada persoalan pengelolaan keuangan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada upaya peningkatan IPM yang merupakan isu nasional yang harus dituntaskan (Halim, 2001; Mahmudi, 2010). Selanjutnya, menyebutkan bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan umum dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan (Yani, 2002).

Selain itu, PAD, DAU dan DAK berpengaruh pada IPM (Ardiansyah & Widiyaningsih, 2014). Kondisi ini sesuai dengan harapan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa dana perimbangan atau dana transfer digunakan untuk mendanai belanja publik. Belanja publik dalam situasi ini digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal di atas, dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Swandewi, 2014). Bahkan penelitian pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa IPM dipengaruhi oleh kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan dana baik itu dana alokasi dan alokasi belanja (Amalia, Purbadharmaja, & BP, 2014; Anggraini, Tika, & Sutaryo, 2015; Damayanti, 2014; Lugastoro, 2013; Sarkoro, 2016; Simanjuntak & Mukhlis, 2014; Swandewi, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka persoalan rendahnya IPM di kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat dianalisis dari faktor dana alokasi yang diterima daerah serta kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut pula, maka penelitian ini akan menguji secara empirik mengenai dua hal, yaitu (1) bagaimana gambaran dana perimbangan, kemandirian keuangan, dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di Jawa Barat; serta (2) menguji pengaruh positif dari dana perimbangan dan kemandirian keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di Jawa Barat.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Teori Agensi dan Otonomi Daerah

Teori agensi berawal dengan adanya penekanan pada kontrak sukarela yang timbul di antara berbagai pihak organisasi sebagai solusi yang efisien terhadap suatu kepentingan (Belkaoui, 2012). Menurut Jensen and Meckling "Agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on

their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent" (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi sejalan dengan sistem otonomi yang diselenggarakan di Indonesia, dimana adanya *principal* (pemerintah pusat) yang memberikan pelimpahan kewenangan kepada *agent* (pemerintah daerah). Dalam melaksanakan kewenangan tersebut bukan berarti pemerintah daerah melakukan kesewenang-wenangan, meskipun pemerintah pusat dan daerah memiliki kepentingan masing-masing namun keduanya tetap memiliki tujuan yang sama yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal (1) "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui otonomi daerah maka daerah harus mampu mengembangkan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum dan lembaga sosial masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sumarsono, 2009).

Otonomi sebagai sistem yang lebih terbuka bagi pemerintah daerah tentu memiliki tujuan dalam penyelenggaraannya. Dengan bahasa yang berbeda tujuan otonomi yaitu meningkatkan pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan (Kansil & Kansil, 2008; Mardiasmo, 2004; Widjaja, 2007; Yani, 2002). Hal ini dipertegas bahwa otonomi daerah diarahkan untuk membangun pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Djaenuri, 2012; Simanjuntak, 2012). Tujuan-tujuan tersebut menyiratkan bahwa masyarakat sebagai titik fokus dari pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan ini dilihat dari segi pemberdayaan masyarakat sebagai penunjang terciptanya daerah otonom yang efektif maupun kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah.

2.2 Keuangan Daerah dan Dana Perimbangan

Sejak diselenggarakannya otonomi daerah, sudah seharusnya pemerintah daerah lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah pada dasarnya dilaksanakan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Djaenuri, 2012). Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Kemudian APBD mengatur pendapatan dan belanja pemerintahan daerah agar efektif dan efisien. Dalam pasal 285 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam konteks pengelola keuangan daerah salah satunya adalah pengelolaan dana perimbangan, dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Dana ini diberikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik (Djaenuri, 2012). Hal ini sejalan dengan makna yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri atas DBH, DHU, dan DAK. Dana perimbangan bertujuan untuk

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah, oleh sebab itu dana perimbangan sering diistilahkan dengan dana tranfer antar pemerintah (*intergovernmental transfer fund*).

Ada tiga jenis dana perimbangan yaitu: dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). *Pertama*, DAU adalah dana yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. DAU berperan menggantikan subsidi daerah otonom dan dana inpres. DAU sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

Adapun formula perhitungan DAU adalah sebagai berikut:

a. Formula DAU

$$\mathbf{DAU = AD + CF}$$

dimana :

AD = Alokasi Dasar, Gaji PNS

CF = Celah Fiskal;

Kebutuhan fiskal – Kapasitas Fiskal

b. Kebutuhan Fiskal (kbF)

$$\mathbf{KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB/Kap)}$$

dimana :

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB/Kap = Indeks Product Domestic Regional Bruto per Kapita

c. Kapasitas fiskal (KpF)

$$\mathbf{KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA}$$

Dimana :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Penerimaan Sumber Daya Alam

d. Porsi DAU

$CF > 0 \rightarrow DAU = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$

$CF = 0 \rightarrow DAU = \text{Alokasi Dasar}$

$CF \text{ negatif} < AD \rightarrow DAU = \text{Alokasi Dasar}$ Setelah perhitungan CF

$CF \text{ negatif} \geq AD \rightarrow DAU = 0$ (Nol)

Sumber: (Lugastoro, 2013)

Kedua, DAK berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dimaknai sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN (Djaenuri, 2012).

DAK dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang (Lugastoro, 2013). Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas.

Ketiga, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana ini bersumber dari pajak, cukai, dan sumber daya alam.

2.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Amalia et al., 2014).

Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pada daerah tersebut (Pambudi, 2008).

Sementara itu, kemandirian keuangan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dapat menunjukkan kontribusi yang besar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dimana kedua hal tersebut merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (Ulum, 2009).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kondisi yang dapat menunjukkan tinggi rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai kebutuhan daerah. Dimana kondisi tersebut dapat menjadi gambaran dalam melihat keberhasilan dari adanya sistem otonomi daerah.

Selain itu, kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan

pemerintah pusat ataupun pinjaman (Halim, 2001). Rumus perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) adalah sebagai berikut :

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: (Halim, 2001)

KKD dilihat dengan membagi jumlah PAD dengan jumlah bantuan dari pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman. Rasio KKD ini memperkenalkan pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Terdapat empat macam pola "hubungan situasional" tersebut adalah pola hubungan instruktif, pola hubungan konsultatif, pola hubungan partisipatif, dan pola hubungan delegatif (Halim, 2004).

Pertama, pola hubungan *instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), dengan rasio kemandirian antara 0% - 25%. Kedua, pola hubungan *konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. dengan rasio kemandirian antara 25% - 75%. Ketiga, pola hubungan *partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah, dengan rasio kemandirian antara 50% - 75%. Keempat, pola hubungan *delegatif*, campur tangan pemerintah pusat tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, dengan rasio kemandirian antara 75% - 100%.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Masyarakat adalah tujuan dari terselenggaranya pembangunan sebuah negara. Kesejahteraan masyarakat adalah kepuasan agregat yang diperoleh individu dalam masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang diharapkan sebagai hasil dari adanya program pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*) yang ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk (BPS, 2015).

Untuk mengukur sebuah peningkatan kesejahteraan masyarakat telah disepakati satu indeks, yang disebut dengan IPM (Todaro & Smith, 2006). IPM adalah alat ukur untuk menilai seberapa tinggi tingkat ketercapaian pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan umum. IPM menggambarkan kondisi masyarakat dengan menggunakan tiga dimensi dalam pengukurannya. Adapun pengukuran tersebut dilihat dari dimensi pengetahuan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagai implikasi dari program pembangunan.

Selanjutnya, IPM sebagai indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, serta standar hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0 - 100 (Pambudi, 2008; Putra & Ulupui, 2015).

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori. Pengelompokan pencapaian IPM wilayah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pencapaian dan Kategori IPM

Pencapaian IPM	Kategori
IPM < 60	IPM rendah
60 IPM < 70	IPM sedang
70 IPM < 80	IPM tinggi
IPM 80	IPM sangat tinggi

Sumber: (BPS, 2015)

IPM sebagai alat ukur pembangunan manusia tentunya memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat IPM adalah sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan DAU. Selanjutnya, pencapaian IPM dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam upaya mengoptimalkan pembangunan manusia (BPS, 2015). Seiring dengan perkembangan tuntutan di tingkat global maka pengukuran IPM pun mengalami perubahan mengikuti perkembangan tersebut.

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan IPM dengan Metode Lama & Metode Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Angka harapan hidup saat lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka melek huruf (AMH)	Angka melek huruf (AMH)	Harapan lama sekolah (HLS)	Harapan lama sekolah (HLS)
	Kombinasi angka partisipasi kasar (APK)	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Rata-rata lama sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran kapita disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran kapita disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik		Rata-rata Geometrik	
	$\frac{1}{3} (I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}) \times 100$		$\sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	

Sumber: (BPS, 2015)

Adapun perubahan perhitungan IPM dengan metode baru terletak pada dimensi pengetahuan, dimana angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Serta dalam metode perhitungan dimana metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan pendekatan verifikatif. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengamatan indikator dari ketiga variabel yang diteliti pada situasi yang tidak dalam pengaturan peneliti, sehingga setiap nilai indikator variabel adalah hasil dari peristiwa yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan pendekatan verifikatif adalah sifat pengujian atas kausalitas dari hubungan antar ketiga variabel, dimana dua variabel yaitu dana perimbangan dan kemandirian keuangan sebagai variabel bebas, dan satu variabel yaitu kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikat.

Untuk proses pengukuran suatu nilai, yang selanjutnya akan diolah melalui analisis data, maka setiap variabel dalam penelitian ini memerlukan penjelasan tentang indikator pengukuran, yang sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Dana Perimbangan (Variabel X1)	Realisasi total dana perimbangan yang terdiri dari : Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)+ Dana Alokasi Khusus (DAK)+ Dana Bagi Hasil (DBH)	Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah (Variabel X2)	Dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
Kesejahteraan Masyarakat (Variabel Y)	IPM, yang dihitung dengan rumus: $\sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	Rasio

Sumber: diolah peneliti

Yang menjadi objek penelitian sekaligus populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten/kota. Namun, dikarenakan keterbatasan data, maka dari seluruh kabupaten/kota populasi terdapat 1 (satu) kabupaten yang tidak memenuhi kecukupan data, yaitu Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan baru dimekarkan pada tahun 2012. Sehingga data yang bisa diolah hanya dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Sesuai dengan operasionalisasi variabel, data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Secara lebih khusus data diunduh situs resmi Badan Pusat Statistik Jawa Barat (www.jabar.bps.go.id) untuk data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011-2014, dan situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id) berupa laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2011-2014.

Teknis analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi linier, yang sebelum ke analisis data akan dilakukan dahulu uji asumsi klasik. Hal ini, agar pemodelan analisis regresinya benar-benar baik dan mampu memberikan estimasi yang handal dan tidak bias sesuai kaidah *best*, *linier*, *unbiased* dan *estimator* (BLUE), yang meliputi uji: Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi dan Linearitas.

Regresi multipel merupakan analisis yang berdasarkan pada hubungan fungsional antara X_1 , X_2 , dan Y, dengan model sebagai berikut:

$$KM = \beta_0 + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 KKD_{it} + \varepsilon$$

Sumber: (Rohmana, 2010)

Dimana:

- KM** : Kesejahteraan Masyarakat (Variabel Dependen)
- DP** : Dana Perimbangan (Variabel Independen 1)
- KKD** : Kemandirian Keuangan Daerah (Variabel Independen 2)
- β_0** : Nilai variabel dependen jika variabel independen bernilai 0
- β_1, β_2** : Koefisien Regresi variabel independen
- ε** : Error
- i** : Kabupaten/Kota
- t** : Tahun

Untuk mengestimasi regresi data panel, maka terdapat tiga uji yang digunakan untuk memilih ketiga teknik analisis regresi linier multipel manakah yang paling cocok digunakan apakah *common effect*, *fixed effect* atau *random effect* (Rohmana, 2010), yaitu: Uji F atau Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Langerange Multiplier (LM), dengan ketentuan bahwa jika pada Uji Chow dan Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *fixed effect*, maka tidak diperlukan Uji LM. Uji LM digunakan jika Uji Chow menunjukkan model yang paling tepat adalah *common effect*, sedangkan pada Uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *random effect model*. Dalam penelitian ini, model estimasi data panel setelah pengujian adalah *fixed effect* yang metode estimasinya menggunakan *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat ada 9 (sembilan) kota dan 18 (delapan belas) kabupaten, yang secara adminitrasi di kelompokkan dalam 4 (empat) wilayah, yang dikoordinasikan dalam Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) I, II, III dan IV. Adapun pembagian tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Barat Berdasarkan BKPP

BPPP	Kabupaten/Kota	BPPP	Kabupaten/Kota
I	Kab. Bogor Kab.Cianjur Kab.Sukabumi Kota Bogor Kota Depok Kota Sukabumi	III	Kab.Cirebon Kab.Indramayu Kab.Kuningan Kab.Majalengka Kota Cirebon
II	Kab.Bekasi Kab.Purwakarta Kab.Karawang Kab.Subang Kota Bekasi	IV	Kab.Bandung Kab.Bandung Barat Kab.Ciamis Kab.Garut Kab.Pangandaran Kab.Sumedang Kab.Tasikmalaya Kota Bandung Kota Banjar Kota Cimahi Kota Tasikmalaya

Sumber: (BPS, 2016)

4.1 Gambaran Dana Perimbangan

Berikut ini akan dijabarkan penerimaan dana perimbangan setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat berdasarkan wilayah yang terbagi dalam Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) :

Tabel 6. Jumlah dan Rata-Rata Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di BKPP I Tahun 2011-2014 (dalam Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
Kab. Bogor	1,781,178	2,048,588	2,313,994	2,498,371	2,160,533
Kab. Cianjur	1,171,748	1,430,477	1,522,548	1,595,594	1,430,092
Kab. Sukabumi	1,249,793	1,481,897	1,613,527	1,759,825	1,526,261
Kota Bogor	602,217	741,642	792,975	855,646	748,120
Kota Depok	679,024	815,920	879,183	971,981	836,527
Kota Sukabumi	407,222	485,128	539,661	570,491	500,626
Rata-rata	981,864	1,167,275	1,276,981	1,375,318	1,200,360

Sumber : *www.djpk.depkeu.go.id* (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa dana perimbangan pada kabupaten dan kota di BKPP I Jawa Barat setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Adapun rata-rata jumlah dana perimbangan pada keenam kabupaten dan kota selama lima tahun sebesar 1,200,360. Dengan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan penerimaan dana perimbangan terbesar. Sementara daerah dengan rata-rata penerimaan terkecil adalah Kota Sukabumi.

Tabel 7. Jumlah dan Rata-Rata Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di BKPP II Tahun 2011-2014 (dalam Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
Kab. Bekasi	1,157,037	1,450,932	1,426,357	1,556,108	1,397,609
Kab. Purwakarta	623,943	792,543	898,515	936,215	812,804
Kab. Karawang	1,201,894	1,413,870	1,528,879	1,580,220	1,431,216
Kab. Subang	1,003,142	1,183,988	1,313,261	1,426,993	1,231,846
Kota Bekasi	960,003	1,216,694	1,193,018	1,286,650	1,164,091
Rata-rata	989,204	1,211,605	1,272,006	1,357,237	1,207,513

Sumber : *www.djpk.depkeu.go.id* (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa dana perimbangan pada kelima kabupaten dan kota di BKPP II Jawa Barat setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Walaupun ada yang sempat mengalami penurunan, misalnya pada Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi pada tahun 2013 mengalami penurunan, dan tahun berikutnya mengalami kenaikan lagi.

Adapun rata-rata jumlah dana perimbangan pada kelima kabupaten dan kota selama lima tahun sebesar 1,207,513. Dengan Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan penerimaan dana perimbangan terbesar. Sementara daerah dengan rata-rata penerimaan terkecil adalah Kabupaten Purwakarta.

Tabel 8. Jumlah dan Rata-Rata Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di BKPP III Tahun 2011-2014 (dalam Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
Kab. Cirebon	1,099,402	1,327,559	1,488,073	1,585,728	1,375,191

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
Kab.Indramayu	1,112,478	1,341,524	1,442,566	1,603,150	1,374,930
Kab.Kuningan	862,737	1,038,403	1,139,711	1,269,156	1,077,502
Kab.Majalengka	981,620	1,275,449	1,171,738	1,272,697	1,175,376
Kota Cirebon	533,162	653,010	630,248	689,248	626,417
Rata-rata	917,880	1,127,189	1,174,467	1,283,996	1,125,883

Sumber : *www.djpk.depkeu.go.id* (diolah peneliti)

BKPP III terdiri atas 4 Kabupaten dan 1 Kota. Dimana dari kelima atau keseluruhan daerah mengalami kenaikan penerimaan dana perimbangan setiap tahunnya. Adapun rata-rata jumlah dana perimbangan pada kelima kabupaten dan kota selama lima tahun sebesar 1,125,883. Dengan daerah penerima perimbangan terbesar adalah Kabupaten Indramayu, disusul oleh Kabupaten Cirebon. Sedangkan Kota Cirebon menjadi daerah penerima dana perimbangan terkecil.

Tabel 9. Jumlah dan Rata-Rata Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di BKPP IV Tahun 2011-2014 (dalam juta Rp)

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
Kab.Bandung Barat	1,511,352	1,954,100	2,104,761	2,261,963	1,958,044
Kab.Ciamis	809,660	977,453	1,043,185	1,118,211	987,127
Kab.Garut	1,123,614	1,353,386	1,494,017	1,270,347	1,310,341
Kab.Pangandaran	1,396,359	1,711,024	1,897,531	2,043,601	1,762,129
Kab.Sumedang	974,499	1,097,731	1,210,498	1,283,942	1,141,668
Kab.Tasikmalaya	1,043,973	1,281,237	1,415,317	1,541,036	1,320,391
Kota Bandung	1,406,734	1,807,075	1,778,972	1,886,016	1,719,699
Kota Banjar	308,269	362,717	395,528	424,289	372,701
Kota Cimahi	422,164	541,183	570,894	625,410	539,913
Kota Tasikmalaya	574,425	686,462	756,558	845,802	715,812
Rata-rata	957,105	1,177,237	1,266,726	1,330,062	1,182,782

Sumber : *www.djpk.depkeu.go.id* (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, dana perimbangan untuk wilayah BKPP IV hanya Kota Bandung yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2013, sementara yang lainnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan penerimaan dana perimbangan terbesar dan yang terendah adalah Kota Banjar.

Dilihat dari keseluruhan di empat BKPP, daerah penerima dana perimbangan tertinggi adalah Kabupaten Bogor, sementara daerah penerima terendah adalah Kota Banjar. Sedangkan dilihat dari rata-ratanya, BKPP II adalah yang terbesar sedangkan terkecil adalah BKPP IV. Ada fenomena menarik lainnya ternyata di wilayah BKPP II tingkat pemerataan antar daerah juga paling merata dibandingkan dengan ketiga BKPP lainnya.

4.2 Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut ini gambaran kemandirian keuangan daerah (KKD) pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun 2011-2014, KKD ini adalah rasio yang dapat menunjukkan keadaan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya.

Tabel 10. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2014

No	Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	Keterangan
1	Kab.Bogor	27.73	40.36	38.11	49.01	Rendah
2	Kab.Sukabumi	9.34	10.59	12.81	20.16	Rendah Sekali
3	Kab. Cianjur	9.11	12.48	13.93	19.61	Rendah Sekali
4	Kab.Bandung	13.46	14.44	18.62	22.70	Rendah Sekali
5	Kab.Garut	6.66	9.05	10.06	14.19	Rendah Sekali
6	Kab.Tasikmalaya	3.81	3.93	3.91	7.55	Rendah Sekali
7	Kab.Ciamis	3.83	4.93	6.12	10.49	Rendah Sekali
8	Kab.Kuningan	7.51	7.15	7.96	12.33	Rendah Sekali
9	Kab.Cirebon	13.17	13.04	12.15	20.91	Rendah Sekali
10	Kab. Majalengka	7.72	7.77	8.64	13.52	Rendah Sekali
11	Kab.Sumedang	12.29	12.53	12.71	18.43	Rendah Sekali
12	Kab.Indramayu	10.18	9.57	9.80	15.95	Rendah Sekali
13	Kab. Subang	7.48	8.61	8.59	13.39	Rendah Sekali
14	Kab.Purwakarta	13.33	15.60	15.20	23.53	Rendah Sekali
15	Kab.Karawang	23.74	38.17	33.23	40.59	Rendah
16	Kab.Bekasi	32.31	41.07	46.92	66.80	Sedang
17	Kab.Bandung Barat	8.63	11.21	13.70	15.90	Rendah Sekali
18	Kota Bogor	26.79	30.60	42.94	45.85	Rendah
19	Kota Sukabumi	23.18	25.97	27.26	36.40	Rendah
20	Kota Bandung	36.63	39.75	51.27	55.96	Sedang
21	Kota Cirebon	16.72	21.44	25.63	34.18	Rendah
22	Kota Bekasi	36.18	37.57	51.33	56.00	Sedang
23	Kota Depok	27.19	40.92	43.37	43.05	Rendah
24	Kota Cimahi	25.03	19.90	25.08	26.57	Rendah Sekali
25	Kota Tasikmalaya	14.75	17.96	17.62	22.16	Rendah Sekali
26	Kota Banjar	10.40	11.19	12.83	21.41	Rendah Sekali

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditunjukkan bahwa untuk tahun 2011 Kota Bandung adalah daerah dengan kemandirian tertinggi diikuti Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Sementara daerah dengan kemandirian terendah adalah Kabupaten Tasikmalaya. Secara keseluruhan kabupaten dan kota di Jawa Barat termasuk kategori “belum mandiri”, hal ditunjukkan dari 26 daerah, hanya 7 daerah yang mencapai rasio antara 25% - 50% atau tergolong “rendah” yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi. Sementara 19 wilayah lainnya masih berada di antara 0% - 25% atau tergolong “rendah sekali”.

Selanjutnya, pada tahun 2012 terdapat peningkatan dua yang meningkat statusnya dari “rendah sekali” ke “rendah”, yaitu Kabupaten Karawang dan Kota Sukabumi, namun Kota Cimahi mengalami penurunan status. Pada tahun 2013, terdapat 2 daerah yang meningkat pada kemampuan keuangan “sedang”, yaitu Kota Bandung dan Kota Bekasi. Kemudian pada tahun 2014, bertambah satu lagi yang termasuk kategori “sedang” yaitu Kabupaten Bekasi, bahkan pada tahun tersebut menjadi daerah yang memiliki rasio kemandirian tertinggi.

4.3 Gambaran Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio IPM. Hal ini sejalan bahwa IPM memiliki banyak manfaat, salah satunya merupakan

indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS, 2015). Tabel 11 berikut ini adalah capaian IPM Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2014.

Tabel 11. Capaian IPM Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2014

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	Kategori
	Jawa Barat	66.67	67.32	68.25	68.8	Sedang
1	Kota Bandung	78.13	78.3	78.55	78.98	Tinggi
2	Kota Bekasi	77.48	77.71	78.63	78.84	Tinggi
3	Kota Depok	76.96	77.28	78.27	78.58	Tinggi
4	Kota Cimahi	74.41	74.99	75.85	76.06	Tinggi
5	Kota Bogor	71.72	72.25	72.86	73.1	Tinggi
6	Kota Cirebon	71.49	71.97	72.27	72.93	Tinggi
7	Kota Sukabumi	68.67	69.74	70.81	71.19	Tinggi
8	Kab.Bekasi	68.66	69.38	70.09	70.51	Tinggi
9	Kab.Bandung	67.78	68.13	68.58	69.06	Sedang
10	Kota Tasikmalaya	67.18	67.84	68.63	69.04	Sedang
11	Kab.Sumedang	66.16	67.36	68.47	68.76	Sedang
12	Kota Banjar	67.15	67.53	68.01	68.34	Sedang
13	Kab.Ciamis	65.48	66.29	67.2	67.64	Sedang
14	Kab.Bogor	64.78	65.66	66.74	67.36	Sedang
15	Kab.Purwakarta	65.51	66.3	67.09	67.32	Sedang
16	Karawang	65.21	65.97	66.61	67.08	Sedang
17	Kab.Kuningan	65.04	65.6	66.16	66.63	Sedang
18	Kab.Subang	64.21	64.86	65.48	65.8	Sedang
19	Kab.Cirebon	64.17	64.48	65.06	65.53	Sedang
20	Kab. Bandung Barat	62.36	63.17	63.93	64.27	Sedang
21	Kab.Sukabumi	61.14	62.27	63.63	64.07	Sedang
22	Kab. Majalengka	62.67	63.13	63.71	64.07	Sedang
23	Kab.Indramayu	61.47	62.09	62.98	63.55	Sedang
24	Kab.Tasikmalaya	61.05	61.69	62.4	62.79	Sedang
25	Kab.Garut	60.55	61.04	61.67	62.23	Sedang
26	Kab.Cianjur	59.38	60.28	61.68	62.08	Sedang
	Rata-rata	66.88	67.51	68.28	68.68	

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diolah peneliti)

Secara keseluruhan setiap tahunnya daerah di Jawa Barat mengalami kenaikan capaian IPM. Pada tahun 2011-2012, daerah dengan pencapaian tertinggi adalah Kota Bandung sedangkan terendah adalah Kabupaten Cianjur. Tahun 2013, daerah dengan capaian tertinggi adalah Kota Bekasi yang terendah adalah Kabupaten Garut. Pada tahun 2014 Kota Bandung kembali menjadi daerah dengan capaian tertinggi dan Kabupaten Cianjur yang kembali menjadi daerah dengan capaian terendah.

Sesuai dengan data di atas, dapat ditunjukkan bahwa rata rata capaian IPM daerah di Jawa Barat masih berkisar antara 60 – 70, yang termasuk kategori “sedang”, meskipun ada daerah, yaitu sebanyak 31% yang mencapai IPM kategori “tinggi” dan itupun didominasi oleh daerah perkotaan. Sementara itu, untuk sisanya sebanyak 18 daerah atau 69,23 daerah tergolong pada capaian IPM dengan kategori “sedang”.

4.4 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji linearitas.

Pertama, hasil uji normalitas ini menggunakan *Software Eviews 9* diperoleh bahwa JB hitung adalah sebesar 1,395454 dan lebih kecil dari nilai *Chi Square* yang sebesar 125,458, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. *Kedua*, Uji Multikolinieritas menggunakan *Software Eviews 9* dengan melihat angka koefisien korelasi antar variabel independen sebesar 0.1245 dan lebih kecil dari 0,8 maka disimpulkan bahwa data pada penelitian ini bebas multikolinieritas. *Ketiga*, Uji Heteroskedastisitas ini digunakan Metode Glejser dengan hasil t statistik sebesar -1.7347 dan tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

Keempat, uji autokorelasi, dengan hasil nilai Durbin-Watson pada model yang digunakan adalah 1,554512. Sedangkan nilai dari tabel D-W dengan $k=2$ dan $n=104$ adalah $dL= 1,6415$ dan $dU= 1,7198$ maka hasilnya adalah $1,6415 > 1,5541 < (4-1,7198)$ maka model tersebut terindikasikan autokorelasi positif. Karena terdapat autokorelasi positif maka dilakukan transformasi logaritma terhadap data. Berdasarkan hasil transformasi logaritma tersebut didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,0245. Maka dalam model ini tidak terjadi lagi autokorelasi karena $1,6415 < 2,0245 < (4-1,7198)$. *Kelima*, uji linieritas merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan ketika menggunakan regresi linier. Adapun hasil uji linieritas dengan menggunakan nilai Durbin diperoleh nilai D-W adalah 2,0256 dan nilai dL dalam tabel Durbin Watson adalah adalah 1,6415. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berbentuk linier karena nilai $DW > dL$ yaitu $2,0256 > 1,6415$.

2. Analisis Regresi Linier Multiple Data Panel

Berikut ini hasil pengolahan analisis regresi linier multiple data panel dengan menggunakan *Software Eviews 9* dengan tiga pendekatan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*.

a. Common Effect Model

Pengujian regresi data panel dengan menggunakan metode *common effect model* menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien sebesar -3,80417 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Sementara kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien sebesar 0.281660 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. Nilai R-square model sebesar 0.654282 menunjukkan bahwa 65,42% tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen dalam model. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Hasil Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.29302	0.889084	74.56330	0.0000
DP	-3.804176	6.427074	-5.918986	0.0000
KKD	0.281660	0.021445	13.13412	0.0000
R-squared	0.654282			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 9

b. Fixed Effect Model

Pengujian regresi data panel dengan menggunakan metode *fixed effect model* menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien sebesar 3,130856 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien sebesar 0.038472 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0003. Sementara nilai *R-square* model sebesar 0.995119 menunjukkan bahwa 99,51% kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen dalam model. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Hasil Regresi Data Panel dengan Pendekatan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.31825	0.318139	199.0270	0.0000
DP	3.130856	3.435720	9.112664	0.0000
KKD	0.038472	0.010074	3.818867	0.0003
R-squared	0.995119			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 9

c. Random Effect Model

Pada Tabel 14 pengujian regresi data panel dengan menggunakan metode *random effect model* dapat dilihat bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien sebesar 2.457564 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien sebesar 0.058032 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. Dan nilai *R-square* model sebesar 0.603922 menunjukkan bahwa 60,39% kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen dalam model. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini.

Tabel 14. Hasil Regresi Data Panel dengan Pendekatan Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.69388	0.660798	96.38933	0.0000
DP	2.457564	3.299132	7.449122	0.0000
KKD	0.058032	0.009722	5.969001	0.0000
R-squared	0.603922			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Ouput Eviews 9

d. Pemilihan Model Akhir

Uji Chow, atau uji statistik F dilakukan untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Common Effect Model* (CEM). Berikut ini merupakan hasil uji Chow menggunakan *Software Eviews 9*.

Tabel 15. Pemilihan Model Regresi Data Panel dengan Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	212.287472	(25,76)	0.0000
Cross-section Chi-square	443.071458	25	0.0000

Sumber: Output Eviews 9

Berdasarkan hasil output uji chow tersebut menunjukkan bahwa baik F-test maupun Chi-square signifikan. (p-value 0,0000 dan 0,0000 lebih kecil dari 5% atau 0,05) sehingga H_0 ditolak, dengan demikian maka *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan *Common Effect Model*.

Uji Hausman, dilakukan untuk mengetahui manakah model yang lebih baik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (RAM). Berikut ini merupakan hasil Uji Hausman menggunakan *Software Eviews 9*.

Tabel 16. Pemilihan Model Regresi Data Panel dengan Uji Hausman

Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
DP	0.000003	0.000002	0.000000	0.0000
KKD	0.038472	0.058032	0.000007	0.0000

Sumber: Output Eviews 9

Berdasarkan hasil Uji Hausman di atas dapat dilihat bahwa p-value 0,0000 < 5%, maka model *Fixed Effect* lebih baik dari *Random Effect*.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Berikut ditampilkan hasil analisis regresi linier multipel menggunakan model *Fixed Effect Model* dengan logaritma natural.

Tabel 17. Hasil Regresi Data dengan Pendekatan Fixed Effect Model (dengan logaritma natural)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.412021	0.075852	44.98237	0.0000
DP	0.054350	0.005939	9.151882	0.0000
KKD	0.016650	0.003286	5.066504	0.0000
R-squared	0.996381			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 9

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier multiple menggunakan *fixed effect model* pada Tabel 17 diketahui bahwa nilai konstanta (β_0) adalah sebesar 3,4120. Nilai koefisien dana perimbangan adalah sebesar 0,0543 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Nilai koefisien kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0.0166 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Dan nilai R-square model sebesar 0.9964 menunjukkan bahwa 99,64% kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen dalam model.

Berdasarkan nilai koefisien tersebut, maka dibuat model regresi linier multiple sebagai berikut:

$$KM_{it} = 3,4120 + 0,0543 DP_{it} + 0.0166 KKD_{it}$$

Selanjutnya untuk untuk memperoleh gambaran mengenai keberartian hubungan regresi antara variabel, dilakukan uji keberartian regresi (Uji F) dengan menggunakan *Software Eviews 9*, dengan hasil nilai F_{hitung} sebesar 775.0087. Sementara nilai F_{tabel} dari tingkat signifikansi 5% sebesar 3,09, yang berarti model regresi dalam penelitian ini dapat dipakai untuk membuat kesimpulan.

4.5 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian

Pertama, gambaran dana perimbangan pada tahun 2011-2014 menunjukkan hampir seluruh kabupaten dan kota mengalami peningkatan penerimaan dana perimbangan setiap tahunnya. Meskipun dana perimbangan yang diterima oleh daerah berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah namun dapat diartikan bahwa disetiap tahunnya pemerintah daerah masih membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk mendanai program-program pelayanan bagi masyarakat maupun urusan pemerintahan lainnya.

Dana perimbangan yang terus meningkat sebaiknya diimbangi oleh kondisi kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, yang artinya dana perimbangan benar-benar digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diharapkan dan menunjukkan hasil yang baik dalam program pembangunan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik (Djaenuri, 2012).

Hasil Uji t yang dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan pendapat tersebut, dikarenakan hasil yang didapatkan positif yang berarti di setiap meningkatnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah diimbangi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan menggunakan IPM dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil dimana dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di Bali. Hasil penelitian ini berarti dana perimbangan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah telah digunakan untuk pembiayaan belanja publik baik dalam urusan perbaikan sarana dan prasarana maupun upaya peningkatan pelayanan pendidikan atau pelayanan kesehatan, maupun dalam upaya memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat (Swandewi, 2014).

Pada hakikatnya, dana perimbangan hadir agar dapat memberikan kemudahan otonomi, sehingga dapat dirasakan secara luas dan menyeluruh bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Dengan sistem ini tentunya dapat meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pengaruh positif dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di Jawa Barat ini menunjukkan sinyal yang baik. Suatu kondisi yang cukup baik jika mengingat tujuan dari adanya perimbangan keuangan. Salah satu hal yang mendorong peningkatan kesejahteraan

tersebut adalah kemampuan pengelolaan keuangan, perkara pengelolaan keuangan tentunya bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh daerah.

Banyak hal lainnya yang dapat mendorong dan membantu pemerintah untuk dapat mengelola keuangan dengan tepat, salah satunya adalah dikarenakan setiap daerah memiliki kapasitas dan kondisi yang berbeda. Daerah perkotaan memiliki kecenderungan lebih mampu mengelola daerahnya jika dibandingkan dengan daerah kabupaten. Karena daerah perkotaan memiliki ruang yang lebih terbuka dalam penyerapan investasi dan kemajuan perindustrian sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita.

Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini berarti setiap peningkatan kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari seberapa besar peran PAD terhadap dana bantuan dan atau pinjaman dari pemerintah pusat diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan capaian IPM.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM (Amalia et al., 2014; Damayanti, 2014; Irwanti, 2014; Widodo, Adi, Waridin, & Johanna, 2011). Dengan kemandirian keuangan daerah yang tinggi berarti bahwa daerah mampu memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri tanpa bantuan dan campur tangan pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah akan mampu meningkatkan.

Kemandirian keuangan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dapat menunjukkan kontribusi yang besar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dimana kedua hal tersebut merupakan komponen dari PAD (Ulum, 2009). Selanjutnya semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2001).

Dalam mengukur kemandirian keuangan daerah, PAD menjadi hal yang paling penting, karena PAD yang tinggi jika dibandingkan dengan bantuan dan pinjaman dari pemerintah pusat akan menunjukkan kemampuan keuangan yang baik dan tingkat ketergantungan yang rendah pada pemerintah pusat. Kontribusi PAD yang besar membuat daerah mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk dapat menggunakan dananya pada pos-pos pengeluaran yang penggunaannya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan PAD yang lebih fleksibel memungkinkan pemerintah memprioritaskan pelayanan dasar pada masyarakat baik dibidang kesehatan maupun pendidikan.

Kemandirian keuangan daerah merupakan cerminan bagaimana daerah tersebut dalam menjalankan sistem otonomi. Karena masyarakat yang siap melaksanakan otonomi adalah daerah yang mandiri yang dapat mengarahkan kebijakannya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal pemberian kewenangan otonomi, daerah dituntut untuk kreatif dalam upaya menggali potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing agar dapat meningkatkan PAD.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaruh dana perimbangan dan kemandirian ditunjukkan memiliki konsistensi pada tahun riset sejak diberlakukannya

otonomi daerah, sampai dengan sekarang. Konsistensi tentang pengaruh tersebut juga terjaga pada seluruh daerah yang pernah diteliti, mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Pulau Jawa dan Bali, Sulawesi dan Papua. Hal ini memiliki implikasi bahwa persoalan desentralisasi atau dapat disebut sebagai pengalokasian dana ke daerah, baik yang sifatnya langsung melalui dana perimbangan maupun yang pemberian kewenangan ke daerah dalam bentuk kewenangan pemungutan PAD, keduanya memiliki dampak positif yang nyata bagi peningkatan pembangunan di daerah, yang salah satunya diukur oleh IPM.

Untuk tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi Pusat untuk menjalankan fungsi otonomi yang kuat (baca: desentralisasi fiskal) dalam bidang keuangan daerah melalui kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan keuangannya. Bahkan dengan melihat data yang ada justru kemandirian keuangan sangat berkaitan dengan sumber PAD yang besar, khususnya di daerah perkotaan.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah agar dalam kebijakan tentang dana perimbangan sebaiknya dikembangkan model yang juga mempertimbangkan celah fiskal yang berbasis peruntukan kawasan, misalnya kenapa beberapa daerah dalam penelitian ini, seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi menerima dana perimbangan yang kecil padahal kawasannya secara regional kewilayahan dijadikan kawasan lindung. Seharusnya kedua daerah tersebut mendapat insentif untuk peruntukkan kawasannya. Pertimbangan ini untuk menjaga agar fungsi dana perimbangan sebagai instrumen pengendalian dan keadilan antar daerah dapat tetap terjaga.

Sedangkan untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk menganalisis lebih mendalam dengan memasukkan level analisis yang lebih mendalam tentang kondisi daerah serta situasi sosial politik, misalnya pergantian kepemimpinan di daerah sebagai variabel moderasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. R., Purbadharmaja, & BP, I. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3(2303-178), 257-264.
- Anggraini, Tika, & Sutaryo. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal SNA 18 Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Ardiansyah, & Widiyaningsih, V. A. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Lombok: Skripsi SNA 17 Mataram Lombok.
- Belkaoui, A. R. (2012). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS. (2015). *Booklet Indeks Pembangunan Manusia: Metodologi Baru*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2016). *Jabar Dalam Angka*. Bandung: BPS.
- Damayanti, M. I. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009 - 2012*. Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat - Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.

- Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Irwanti, E. (2014). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat Periode 2008 - 2012. Makasar: Skripsi Universitas Hasanudin.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. (2008). Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lugastoro, D. P. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Pambudi, S. B. (2008). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa barat. Bogor: Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11.3(2302-8556), 863-877.
- Rohmana, Y. (2010). Ekonometrika Teori dan Aplikasi dengan Eviews. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi FPEB UPI.
- Sarkoro, H. (2016). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2012 - 2014). Surakarta: Skripsi, FEB, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Simanjuntak. (2012). Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2014). Empirical Study The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial, and Human Development Indeks Regional Economic. Study in East Java Province, Indonesia for 2008 - 2011. *International Journal of Economics and Finance*, 7(1).
- Sumarsono, H. (2009). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999 - 2004). *JESP*, 1(1).
- Swandewi, A. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3.7(2337-3067), 356-376.
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2006). Economic Development. Jakarta: Erlangga.
- Ulum, I. (2009). Audit Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, H. A. . (2007). Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Widodo, Adi, Waridin, & Johanna, M. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1, 1-183.
- Yani, A. (2002). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Persada.

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Website:

www.djpk.depkeu.go.id

www.jabar.bps.go.id